

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
INTISARI	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SKEMA	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	21
C. Keaslian penelitian	21
D. Manfaat penelitian	26
E. Tujuan penelitian	27
F. Metode penelitian	28
1. Jenis penelitian	28
2. Data yang dicari	30
3. Cara mencari data	33
4. Cara menganalisis data	37

5. Jalannya penelitian	38
6. Kesulitan dalam penelitian	39
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Tinjauan tentang sita aset tindak pidana dalam pengembalian aset	40
1. Aset	40
2. Sita aset tindak pidana: <i>instrumentum sceleris</i> , <i>obiectum sceleris</i> , dan <i>fructum sceleris</i>	53
a. <i>Instrumentum sceleris</i>	57
b. <i>Obiectum sceleris</i>	59
c. <i>Fructum sceleris</i>	61
d. Aset tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana	68
3. Pengembalian aset	70
4. Filosofi, prinsip, dan doktrin pengembalian aset	74
5. Prasyarat pengembalian aset	80
a. Kemauan politik negara (<i>Political will</i>)	80
b. Sistem hukum	83
c. Kerjasama kelembagaan	88
d. Kerjasama internasional	89
B. Kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana dihubungkan dengan pengembalian aset	92
C. Tinjauan teori dan hukum pembuktian	103
1. Bukti dan pembuktian	104
2. Pengujian umum terhadap bukti dengan <i>admissibility</i> (<i>General Admissibility Test</i>)	112

3. Beberapa tolak ukur hukum pembuktian	126
a. <i>Bewijsmiddelen</i>	126
b. <i>Bewijs minimum</i>	139
c. <i>Bewijslast</i>	144
d. <i>Bewijsvoering</i>	152
e. <i>Bewijskracht</i>	160
D. Hukum eksekusi dihubungkan dengan pengembalian aset	162
1. Eksekusi putusan pengadilan	162
2. Eksekusi yang berhubungan dengan pengembalian aset	169
a. Eksekusi denda	169
b. Eksekusi perampasan benda sitaan untuk negara	170
c. Eksekusi uang pengganti dan sita harta benda oleh jaksa	172
d. Eksekusi aset tindak pidana yang berada di luar negeri	174
BAB III LANDASAN TEORI	177
A. Substansi, struktur, dan budaya hukum dalam sistem hukum	177
B. Parameter pembuktian	183
1. Teori pembuktian (<i>bewijstheorie</i>)	184
a. Teori pembuktian dalam sistem <i>civil law</i>	184
b. Teori pembuktian dalam sistem <i>common law</i>	187
2. Pembagian beban pembuktian dalam perkara pidana	200
a. Beban pembuktian pada penuntut umum	201
b. Beban pembuktian pada terdakwa	205
C. Teori <i>balance probability</i>	213
D. Teori basis sita aset	215

1. Sistem sita aset berbasis properti (<i>property-based system</i>)	216
2. Sistem sita aset berbasis nilai (<i>value-based system</i>).....	218
3. Sistem kombinasi (<i>combination system</i>)	223

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN224

A. Kendala sita aset tindak pidana korupsi dalam pengembalian aset225

1. Proses umum pengembalian aset dihubungkan dengan aturan dan praktik di Indonesia	225
a. Pengumpulan bahan keterangan, bukti, dan penelusuran aset	225
b. Pembekuan aset dan penyitaan aset di dalam dan luar negeri	236
1) Pembekuan atau pemblokiran aset	236
2) Penyitaan aset	242
a) Penyitaan aset di luar negeri melalui kerjasama internasional	242
b) Penyitaan aset di dalam negeri	245
c. Persidangan	251
1) <i>Post-conviction confiscation</i> (sita aset melalui peradilan pidana)	252
2) <i>Civil proceeding in personam</i> (prosedur perdata <i>in personam</i>)	264
3) <i>Civil procedures against property (in rem)</i> atau <i>Civil forfeiture or confiscation in rem</i>	271
4) <i>Partie civile/Acción civil resarcitoria/Third party civil action</i>	273
d. Pengelolaan aset	275
e. Penyerahan dan pemanfaatan aset	277
2. Upaya pengembalian aset dan kendalanya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi	282

a. Kasus tindak pidana korupsi pengadaan <i>bus busway</i> tahun 2013 atas nama Agus Sudiarso, Chen Chong Kyeong, dan Budi Susanto	284
1) Kasus posisi tindak pidana korupsi pengadaan <i>bus busway</i>	284
2) Upaya pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan <i>bus busway</i>	288
b. Kasus tindak pidana korupsi kegiatan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) penyaluran benih bersubsidi PT. Sang Hyang Seri (persero) atas nama Eddy Budiono, Mamat Rachmat, Nizwar Syafaat, Kaharuddin, dan Yohanes Maryadi Padyaatmaja	293
1) Kasus posisi tindak pidana korupsi dalam kegiatan PSO penyaluran benih bersubsidi	293
2) Upaya pengembalian aset dalam perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan PSO penyaluran benih bersubsidi	297
c. Analisis terhadap praktik sita aset dalam kasus tindak pidana korupsi	300
B. Sita aset tindak pidana korupsi dan pembuktian dihubungkan sistem sita aset berbasis properti (<i>property-based system</i>) dan berbasis nilai (<i>value-based</i> system).....	321
1. Analisis terhadap ketentuan sita aset dan pembuktian	324
2. Analisis sita aset dan pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang berelemen kerugian keuangan negara	351
a. Kasus tindak pidana korupsi terkait aset tanah PT. KAI di <i>Center</i> <i>Point</i> Kota Medan	353

b. Kasus tindak pidana korupsi dana <i>Public Service Obligation</i> penyaluran benih bersubsidi oleh PT. SHS	360
c. Kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konstruksi gedung Pustekdata dan Pusfatja LAPAN	364
3. Analisis pembuktian sita aset dalam tindak pidana korupsi yang tidak berelemen kerugian keuangan negara	370
a. Kasus gratifikasi sebagai suap atas nama Udar Pristono	374
b. Kasus penyuapan penegak hukum atas nama Raden Brotoseno	385
c. Kasus tindak pidana korupsi “pungli” di KPP Bea dan Cukai Tanjung Emas Semarang	388
d. Kasus penyitaan harta benda dalam perkara suap hakim Syarifuddin yang digugat perdata	399
4. Implikasi teori dalam penerapan sistem sita aset dan formulasi pembuktian	402
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	411
A. Kesimpulan	411
B. Saran.....	414
TABEL	416
SKEMA	435
DAFTAR PUSTAKA	440
INDEKS ISTILAH.....	451
INDEKS SUBJEK	454
<i>GLOSARIUM</i>	456
<i>CURRICULUM VITAE</i>	460